

**IMPLEMENTASI PASAL 115 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPTPD PAJAK
HOTEL DENGAN TIDAK BENAR**

(Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-
Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Akbar Sidiq

NIM. 125010118113016



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

IMPLEMENTASI PASAL 115 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK
YANG MENYAMPAIKAN SPTPD PAJAK HOTEL DENGAN TIDAK BENAR(Studi Di
Dinaspendapatan Daerah Kabupatentulungagung)

Akbar Sidiq, Agus Yulianto SH. MH., Dr. TunggulAnshari SN, SH., MH.

FakultasHukumUniversitasBrawijaya

Email: Sidiqz_7@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam Prakteknya, pemungutan pajak hotel tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak kendala kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Salah satunya adalah wajib pajak hotel yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara tidak bnar. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan data pajak yang masuk ke dalam kas daerah. Sehingga menyebabkan kerugian pemasukan. Maka Perlu Dibahas Mengenai Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan Sptpd Pajak Hotel Dengan Tidak Benar Di Dinas pendapatan Daerah Kabupaten tulungagung.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kaitan Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Dengan Tidak Benar tidak melakukan sesuai amanat Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Hotel.

Dalam kaitan Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Dalam Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Teradap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Dengan Tidak Benar adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat. Sehingga dalam prakteknya masih banyak kecurangan-kecurangan. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak hotel secara berkala dan mendorong petugas pajak untuk berkompeten dalam bertugas untuk menghindari penyuapan yang dilakukan wajib pajak.

Kata Kunci : Implementasi, Penyampaian SPTPD tidak benar.

**THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 115 OF TULUNGAGUNG REGENCY
LOCAL REGULATION NO.16/2010 ABOUT LOCAL TAX AGAINST TAXPAYERS
WHO SUBMIT THE INCORRECT HOTEL TAX SPTPD (Study at Local Income
Official of Tulungagung Regency)**

Akbar Sidiq, Agus Yulianto SH, MH, Dr. Tunggul Anshari SN SH, MH

Faculty of Law, Brawijaya University

Email: Sidiqz_7@yahoo.com

ABSTRACT

The practice of collecting hotel tax was problematic. Local Income Official of Tulungagung Regency encountered some problems when it must collect hotel tax. The submission of the incorrect Local Tax Report (SPTPD) by hotel taxpayers was one of those problems. This problem potentially induced the lacking of tax data that must be converted into the local cash income. This problem also preceded the discussion about the implementation of Article 115 of Tulungagung Regency Local Regulation No.16/2010 about Local Tax Against Taxpayers Who Submit The Incorrect Hotel Tax SPTPD to Local Income Official.

Based on the result of research, it was concluded that other legal bases had supported the implementation of Article 115 of Tulungagung Regency Local Regulation No.16/2010 about Local Tax Against Taxpayers Who Submit the Incorrect Hotel Tax SPTPD. These bases included the mandates provided by other relevant Local Regulations and also by the Regent Decree No.31/2012 about the Manual of Hotel Tax Collection.

The community, including taxpayers, was still ignorant about how important was the implementation of Article 115 of Tulungagung Regency Local Regulation No.16/2010 about Local Tax Against Taxpayers Who Submit the Incorrect Hotel Tax SPTPD. Such ignorance might have been irritating. The potentialities of fraud and deception during the practice of tax collection only exacerbated the problem. Research had given several suggestions. Hotel taxpayers must be subjected to periodic examination for their tax trustworthiness. Tax officers should be urged to be competent enough at work and be required to avoid bribery from taxpayers.

Keywords: Implementation, Submit the Incorrect SPTPD

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi	11
B. Pengertian Pajak	12
C. Pemungutan Pajak Daerah	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Jenis Data	26
D. Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Alasan Pemilihan Lokasi	28
G. Populasi Sampel	28
H. Teknik Analisa Data	29
I. Definisi Operasional	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	31
B. Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak	

Yang Menyampaikan SPTPD Dengan Tidak Benar53

C. Upaya yang Dilakukan C. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi

Hambatan Dalam Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten

Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap

Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Dengan Tidak Benar72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA77



HALAMAN PENGESAHAN

JudulSkripsi : IMPLEMENTASI PASAL 115 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPTPD PAJAK HOTEL DENGAN TIDAK BENAR

(Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)

Identitas Penulis :

a. Nama : Akbar Sidiq

b. NIM : 125010118113016

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

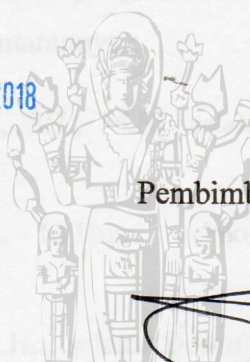
Disetujui pada tanggal : 17 JUL 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

AGUS YULIANTO SH. MH.

NIP. 195907171986011001



DR. TUNGGUL ANSHARI SN., SH. MH

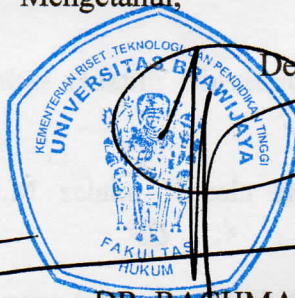
NIP.195905241986011001

Mengetahui,

KetuaBagian

Dekan,

Hukum Administrasi Negara



LUTFI EFFENDI, S.H., M., Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

DR. RACHMAD SAFA'AT, SH, M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 115 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB
PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPTPD PAJAK
HOTEL DENGAN TIDAK BENAR**

(Studi di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulungagung)

Identitas Penulis :

a. Nama : Akbar Sidiq
b. NIM : 125010118113016

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal :

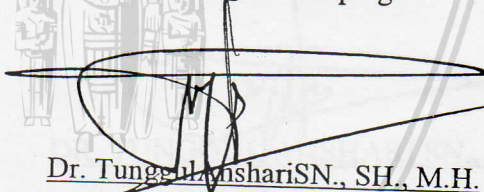
Pembimbing Utama



Agus Yulianto SH. M.H.

NIP. 195907171986011001

Pembimbing Pendamping



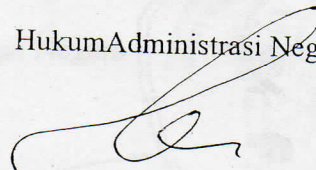
Dr. Tunggul L. Shari SN., SH., M.H.

NIP. 195905241986011001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H., M., Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 115 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPTPD PAJAK HOTEL DENGAN TIDAK BENAR (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung).”** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti.
4. Bapak Dr. Tunggul Anshari SN, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas ilmu pengetahuan yang diberikan.
6. Bapak Dr. Eko Sugiono M.M selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Orang tua saya Ibu Salbiyah yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan doa yang tiada henti kepada saya. Keluarga Besar dan saudara-saudara

dirumah Tulungagung, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah kalian berikan selama ini.

8. Diki, Ade bayu, harli firmansyah, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
9. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, terutama dalam susunan, tata cara penulisannya atau mungkin dari kelengkapan data dan bagian-bagian lainnya, oleh karena itu pintu saran dan kritik sangat terbuka lebar dan peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik tersebut guna kesempurnaan skripsi ini. Harapannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada khususnya.

Malang, 31 Januari 2017

(AKBAR SIDIQ)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah Negara, karena dengan adanya pajak maka kebutuhan Negara akan pembelanjaan dapat terpenuhi. Pembelanjaan Negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Negara sendiri. Tanpa adanya pajak pemerintah tidak dapat melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Pajak dipungut dengan sistem paksaan, mau tidak mau rakyat harus membayar pajak kepada Negara. Tak terkecuali hal ini juga sama di Negara Indonesia ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dalam pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Pajak sendiri dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah maka Daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak yang telah ditentukan. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain yang telah ditentukan didalam peraturan tersebut.¹ Dalam pemungutan pajak sendiri tentunya terdapat kendala-kendala yang harus diatasi oleh pemerintah. Tak terkecuali di Kabupaten Tulungagung. Di Kabupaten Tulungagung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung merupakan satu-satunya pihak yang berhak memungut pajak daerah.

Kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah masih banyaknya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dengan benar (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD ini merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk memberitahukan, memperhitungkan pembayaran pajak atau objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atauharta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah². Dengan adanya kendala seperti diatas maka tentu saja mempengaruhi perolehan pajak daerah yang diterima oleh Kabupaten Tulungagung. Sehingga perolehan pajak tidak semaksimal seperti yang telah dianggarkan oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung.

Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung harus melakukan tindak lanjut untuk mengatasi hal diatas. Yaitu dengan menerapkan

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (3) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

² Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 angka 39 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B.

sanksi seperti yang tertera didalam Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

KETENTUAN PIDANA Pasal 115

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi yang dimaksud adalah sanksi pidana atau sanksi denda kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dengan benar. Sehingga perlu dikaji mengenai penerapan pasal tersebut apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak, karena sampai saat ini nyatanya masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dengan benar.

Terutama pajak hotel, yang merupakan bagian yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Mengingat hotel-hotel di Tulungagung jumlahnya lebih dari 10 hotel. Dari sekian jumlah tersebut masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD nya dengan

benar. Sehingga petugas mengalami kesulitan dalam pendataan pajak hotel. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan melakukan penelitian terkait masalah diatas dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 115 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPTPD PAJAK
HOTEL DENGAN TIDAK BENAR.**

Tabel 1
Penelitian sebelumnya tentang tema yang sama

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2015	Nadiah Evi Istigoni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	“Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Penghasilan Yang Melakukan Pelanggaran Perpajakan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak	(1) Bagaimana penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran	Implementasi Pasal 31 Ayat 3 Huruf C Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Di Area Mall

			Pratama Surabaya Genteng)	perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng ? (2) Apa saja hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan ?	Olympic Garden Malang
2	2016	Anjani Anandito Asri, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Implementasi Pasal 31 Ayat 3 Huruf C Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Di	Bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (3) Huruf C Perda Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak	Implementasi Pasal 31 Ayat 3 Huruf C Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terhadap

			Area Mall Olympic Garden Malang (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Dan Mall Olympic Garden Malang)	Daerah terhadap wajib pajak di area Mall Olympic Garden Malang ? (2) Apa hambatan dalam implementasi Pasal 31 Ayat (3) Huruf C Perda Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terhadap wajib pajak di area Mall Olympic Garden Malang ?	Wajib Pajak Di Area Mall Olympic Garden Malang
--	--	--	--	--	---

Sumber : Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 2016.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Pajak Hotel dengan tidak benar ?
2. Apa hambatan dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Pajak Hotel dengan tidak benar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Pajak Hotel dengan tidak benar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Pajak Hotel dengan tidak benar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian tentang Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD dengan tidak benar ini dapat berguna untuk menambah atau memperluas wacana bagi pengembangan akademisi umumnya dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara khususnya terkait permasalahan dalam pemungutan pajak daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan sekaligus memicu kinerja pemerintah daerah sebagai penyedia layanan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk menjadi lebih baik lagi khususnya dalam hal pemungutan pajak daerah.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung agar dapat meningkatkan

kinerjanya setiap tahun dalam mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak khususnya terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPTPD dengan tidak benar.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan ini memberikan gambaran jelas serta terarah mengenai penyusunan penelitian skripsi yang akan dilaksanakan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan atau menyajikan teori-teori secara lebih mendalam yang melandasi penulisan dan analisis pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian. Kajian teori yang diuraikan di dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi, pajak daerah, wajib pajak dan pemungutan pajak daerah serta penjelasan mengenai hukuman pidana dan denda.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi antara

lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai laporan hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan hasil rumusan masalah yang ada yaitu berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Pajak hotel dengan tidak benar.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini terdiri dari 2 (dua) sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis besar pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan saran diperoleh berdasarkan ketidaksesuaian antara aturan dengan teori yang ideal. Selanjutnya dari saran ini dapat memicu kinerja pemerintah menjadi lebih baik lagi khususnya dan dapat berguna bagi semua pihak yang membaca.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Ada beberapa contoh pengertian dari implementasi atau pelaksanaan, berikut beberapa contoh dari pengertian implementasi, menurut Nurdin Usman adalah “implementasi berkaitan erat dengan aktivitas, tindakan atau pelaksanaan sebuah sistem.”¹ Bukan hanya mengenai aktivitas atau tindakan saja tetapi implementasi mengacu kepada kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan tersebut. Oleh karena itu implementasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk nyata atau realisasi dari suatu aturan hukum yang telah ditentukan apabila dikaitkan dengan implementasi hukum.

Menurut Guntur Setiawan bahwa “implementasi merupakan interaksi yang antara satu dengan yang lain saling menyesuaikan, interaksi yang dimaksud adalah tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan pelaksana dan birokrasi untuk merealisasikan secara efektif.”²

Implementasi adalah salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi selalu didahului oleh adanya kebijakan, sangat mustahil apabila implementasi ada terlebih dahulu tanpa adanya suatu kebijakan yang mendahuluinya. Kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Menurut Gaffar “Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bintang Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm 70.

² Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2004, hlm 39.

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.”³

B. Pengertian Pajak

Dalam sebuah Negara, pemerintahan akan berjalan apabila ada dana yang menyokongnya. Dana yang dimaksud adalah pajak, pajak berfungsi sebagai penjalan roda pemerintahan guna menjaga kepentingan rakyat, dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan maupun kecerdasan bangsa. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”⁴.

Pajak didapat dari rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat melalui pemerintah. Pemungutan pajak sendiri haruslah dipungut berdasarkan perintah undang-undang. Tanpa ada aturan maka pemungutan tersebut termasuk dalam pungutan liar. Hal ini sesuai dengan Pasal 23A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa Pajak harus dipungut berdasarkan Undang-Undang. Dalam pasal 23A berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”⁵.

Berikut merupakan pengertian pajak yang dikutip dari buku Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton⁶.

a. Mr. Dr. N. J. Fieldman

³ Afan Gaffar, **Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi**, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 295.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A

⁶ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, 2013, hlm 6.

“Pajak adalah prestasi sepihak yang dipaksakan oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

b. Prof. Dr. M.J.H Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pengertian diatas menunjukkan pengertian pajak yang menonjol dari fungsi *budgeter* dari pajak.

c. Dr. Soeparman Soehamidjaja

“Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

d. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

e. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁷.

Dari kelima pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan ada lima unsur dalam pajak yaitu :

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
- b. Bersifat memaksa.
- c. Tidak ada kontra prestasi yang langsung.
- d. Pemungutan dapat dilakukan Negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah.

Pajak dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan yang memungut yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah Provinsi maupun yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak pusat yang dipungut oleh Dirjen Pajak antara lain⁸:

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas penggunaan atau konsumsi barang atau jasa yang kena pajak yang klasifikasi barang atau jasanya ditentukan di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikecualikan bagi barang ataupun jasa yang tidak ditentukan didalam Undang-Undang tersebut. Contoh pakaian, sepatu, dan lain-lain, pajak ini dikenakan atas orang yang mengkonsumsi jenis barang atau jasa yang telah disebutkan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut.

- b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 10 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

⁸Belajar Pajak, 2012, (online), <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses 23 September 2016

Pajak ini dipungut berdasarkan konsumsi barang mewah kena pajak. Klasifikasi barang yang termasuk barang mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan primer, dikonsumsi masyarakat tertentu dengan penghasilan yang tinggi, pengonsumsiannya menunjukkan status serta dapat mengganggu masyarakat dan ketertiban. Barang mewah ini juga dikenakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selain Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan seseorang atau penghasilan suatu badan. Pengertian penghasilan sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menyebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.⁹

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dipungut dari pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, surat berharga, akta notaris, kwitansi pembayaran, dan efek.

Berikut adalah jenis-jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jenis pajak provinsi¹⁰:

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Pajak kabupaten/kota terdiri atas¹¹:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

h. Pajak Parkir

Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

i. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

j. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarangburung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

l. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Pengenaan pajak ditujukan kepada wajib pajak, wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Sedangkan subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak. Setiap wajib pajak merupakan subjek pajak. Pengertian Objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenai pajak¹²

C. Pemungutan Pajak Daerah

¹² Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta, 2013. Halaman 43.

Pemungutan pajak maupun retribusi merupakan hal paling utama dan penting yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah khususnya aparat pemungut pajak untuk mengoptimalkan potensi akan hasilnya. Pada dasarnya pajak dipungut bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan dalam proses pemungutan tersebut terdapat pokok-pokok pemikiran para ahli hukum di bidang pajak maupun retribusi yang dituangkan dalam asas-asas pemungutan pajak, hal tersebut menjadi landasan atau latar belakang pentingnya akan hakikat suatu pemungutan pajak.

Asas-asas yang pada umumnya digunakan dalam pemungutan pajak yaitu :¹³

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini diberlakukan bagi wajib pajak di dalam negeri, hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang bertempat tinggal disuatu negara yang memperoleh penghasilan berasal dari dalam maupun luar negeri yang merupakan seluruh penghasilan wajib pajak dan berhak dilakukan pemungutan pajak oleh negara yang menjadi tempat tinggal wajib pajak tersebut.

b. Asas Sumber

Pada dasarnya asas ini memiliki pengertian bahwa tempat tinggal wajib pajak tidak dijadikan sebagai tolak ukur atau dasar suatu negara dalam melakukan penetapan pemungutan pajak dalam hal ini terhadap penghasilan wajib pajak yang bersumber atau berasal di wilayahnya.

c. Asas Kebangsaan

¹³ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2003, halaman 7.

Asas ini diberlakukan bagi wajib pajak di luar negeri, hal tersebut disebabkan kebangsaan suatu negara dijadikan sebagai dasar dalam pemungutan pajak. Dapat dilihat contoh sebagai berikut misal, seseorang yang bertempat tinggal pada negara A serta tidak memiliki kebangsaan pada negara A, maka selanjutnya negara A berhak melakukan pemungutan pajak bangsa asing terhadap seseorang tersebut dengan didasarkan pada kebangsaannya.

Berikut ini merupakan beberapa teori yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :¹⁴

1) Teori Asuransi

Negara melakukan pemungutan pajak berfungsi sebagai alat pelindung setiap individu yang meliputi segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Oleh sebab itu pembayaran iuran pajak dalam waktu tertentu dianggap sebagai premi asuransi.

2) Teori Kepentingan

Sejalan dengan pemikiran teori asuransi di atas, dalam teori ini juga menyatakan bahwa negara melakukan pemungutan pajak yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Tingkat perlindungan yang diberikan oleh negara dapat dilihat dan diukur melalui jumlah atau besarnya kepentingan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Sehingga semakin besarnya kepentingan yang dibutuhkan oleh wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang dapat dibayarkan kepada negara.

¹⁴ Tunggul Anshari, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia, Malang, 2005, halaman 35.

3) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Negara berhak membebankan kewajiban kepada setiap individu yang berada di dalam suatu negara, sebagai contohnya adanya kewajiban pembayaran pajak serta kewajiban yang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena munculnya setiap individu tersebut tidak berdiri sendiri melainkan adanya suatu bentuk wadah individu yaitu negara. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada negara maka tidak akan ada individu. Teori ini timbul berdasarkan paham "*Organische Staatsleer*" yang pada intinya memiliki ajaran bahwa munculnya hak negara untuk melakukan pemungutan pajak dikarenakan adanya negara.

4) Teori Daya Beli

Adanya pemungutan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dan dapat diibaratkan sebagai alat pompa penyedot daya beli masyarakat yang bertujuan mencapai cita-cita atau tujuan negara serta untuk memelihara kesejahteraan kehidupan masyarakat.

5) Teori Daya Pikul

Bahwa suatu bentuk perlindungan yang telah diberikan oleh negara terhadap setiap individu dalam bentuk jasa bertujuan untuk melindungi jiwa dan harta benda setiap individu. Oleh sebab itu dalam proses pemberian perlindungan tersebut juga harus memerlukan biaya yang wajib dipikul oleh semua individu yang telah menikmati perlindungan tersebut dan dituangkan dalam suatu bentuk pajak yang wajib dibayarkan dan diukur berdasarkan daya pikul seorang individu.

Hal tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan dasar keadilan adanya pemungutan paja



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tepatnya Kabupaten Tulungagung terletak pada garis bujur dan garis lintang $111^{\circ} 43'$ sampai dengan $112^{\circ} 07'$ bujur timur dan $7^{\circ} 51'$ sampai dengan $8^{\circ} 18'$ lintang selatan.

Luas Kabupaten Tulungagung sekitar 1.055,65 Km², terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 257 desa/kelurahan. Semua kecamatan secara keseluruhan daerah dataran rendah kecuali untuk Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang hanya empat desa yang memiliki dataran rendah. Untuk daerah yang memiliki dataran sedang dan dataran tinggi hanya ada di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang.¹

1 Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung dan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung, **Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2013**, BPS Kabupaten Tulungagung, Tulungagung, 2013, hlm 3-4

Peta Kabupaten Tulungagung



Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung

Batas daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Kediri.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Blitar.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia/Indonesia.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan

Kabupaten Ponorogo.²

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 37, Telepon/Fax (0355) 320098, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

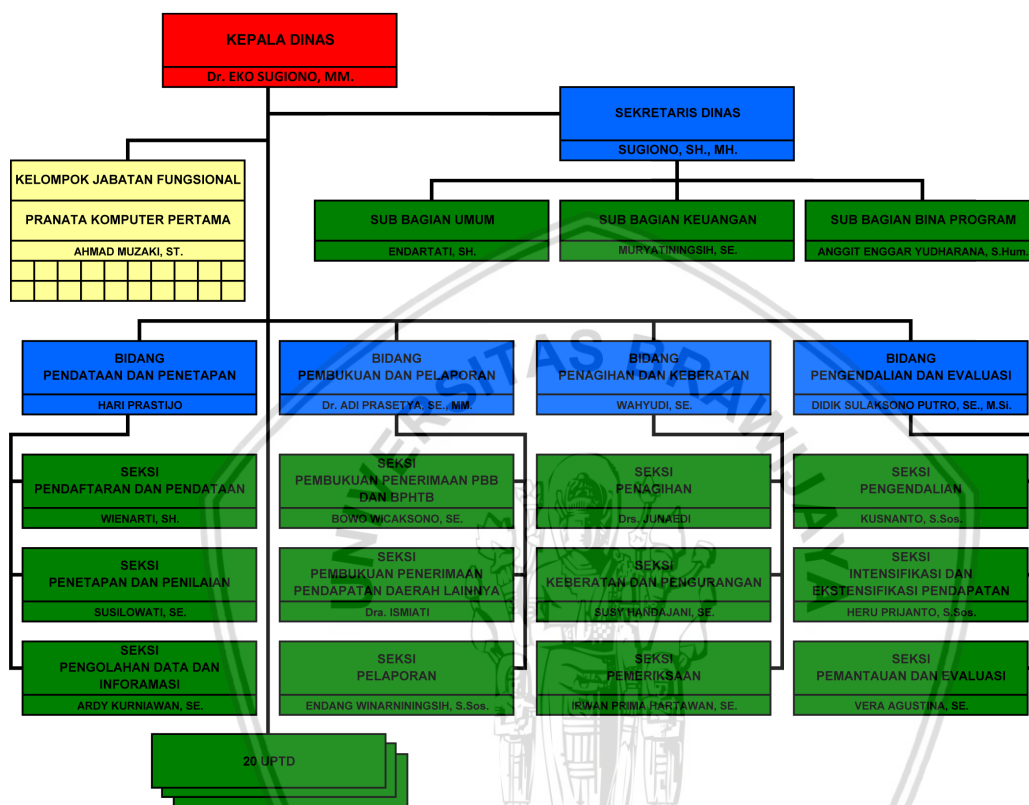
Gambar 4.1

² Ibid. hlm 3.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG



Adapun susunan dan mekanisme kerja atau tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sesuai gambar bagan yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari³ :

- a Kepala Dinas
- b Sekretariat, membawahi :
 - 1 Sub Bagian Umum.

3 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung .
Pasal 5, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

- 2 Sub Bagian Keuangan.
- 3 Sub Bagian Bina Program.
- c Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :
 - 1 Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
 - 2 Seksi Penetapan dan Penilaian.
 - 3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- d Bidang Pembukuan dan Pelaporan membawahi :
 - 1 Seksi Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB.
 - 2 Seksi Pembukuan Penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya.
 - 3 Seksi Pelaporan.
- e Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :
 - 1 Seksi Penagihan.
 - 2 Seksi Keberatan dan Pengurangan.
 - 3 Seksi Pemeriksaan.
- f Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
 - 1 Seksi Pengendalian.
 - 2 Seksi Intenfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan.
 - 3 Seksi Pemantauan dan Eyaluasi.

Untuk tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Tulungagung adalah sebagai berikut :

a Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan.⁴ Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi⁵ :

4 *Ibid.* Pasal 6, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

- 1 pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan dinas.
- 2 perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- 3 pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas.
- 4 pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
- 5 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas, penyusunan program dan perencanaan Dinas, penyusunan anggaran pendapatan daerah serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.⁶

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi⁷ :

- 1 pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan Dinas.
- 2 penyusunan program dan perencanaan Dinas.
- 3 perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah.
- 4 penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Dinas.

5 *Ibid.* Pasal 7, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

6 *Ibid.* Pasal 8, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

7 *Ibid.* Pasal 9, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

- 5 pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- 6 pembinaan administrasi kepada UPTD.
- 7 pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
- 8 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekertaris dinas seperti yang telah dijelaskan diatas terdiri dari 3 bagian yaitu :

- 1 Sub Bagian Umum mempunyai tugas⁸ :
 - a melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga.
 - b melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian.
 - c menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.
 - d melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat.
 - e menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - f melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a melakukan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan.
 - b menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang.
 - c melakukan pembayaran gaji pegawai.
 - d menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - e melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3 Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas :
 - a menyiapkan bahan penyusunan progam dan perencanaan kegiatan Dinas.
 - b menyiapkan bahan monitoring, evalusasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas.
 - c menyusun rencana anggaran pendapatan daerah.
 - d melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - e menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - f melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

8 *Ibid.* Pasal 10, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

Masing – masing Sub Bagian yang telah disebutkan diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

c Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pendaftaran, pendataan, penetapan, penilaian, pengolahan data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi⁹ :

- 1 perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah.
- 2 pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah.
- 3 penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah.
- 4 penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5 pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah.
- 6 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas¹⁰.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi (tiga) seksi yaitu :

- 1 Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas¹¹ :

9 *Ibid.* Pasal 11 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

10 *Ibid.* Pasal 11 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

- a mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
- b melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah.
- c melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- d melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB).
- e menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- f melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2 Seksi Penetapan dan Penilaian mempunyai tugas¹² :
 - a mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB.
 - b melakukan penilaian nilai jual objek pajak.
 - c menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB P2.
 - d melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah.
 - e menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - f melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas¹³ :
 - a membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD.
 - b mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak.

11 *Ibid.* Pasal 12 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

12 *Ibid.* Pasal 12 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

13 *Ibid.* Pasal 12 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

- c mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB.
- d melakukan entry data hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta.
- e menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- f melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Masing – masing Seksi tersebut diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.¹⁴

d Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pembukuan penerimaan dan pelaporan¹⁵. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi¹⁶ :

- 1 perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
- 2 pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P-2.
- 3 pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2.
- 4 pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi.
- 5 penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
- 6 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

¹⁴ *Ibid.* Pasal 12 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

¹⁵ *Ibid.* Pasal 13 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

¹⁶ *Ibid.* Pasal 13 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.¹⁷

Dibawahnya terdapat seksi-seksi sebagai berikut :

- 1 Seksi Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB mempunyai tugas¹⁸ :
 - a menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB.
 - b melakukan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB.
 - c melakukan koordinasi pemungutan PBB P-2.
 - d menyusun laporan PBB (mingguan dan bulanan) dan BPHTB (bulanan).
 - e melakukan perhitungan tunggakan PBB P-2 dan BPHTB.
 - f menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - g melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2 Seksi Pembukuan Penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas¹⁹ :
 - a menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB).
 - b melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah selain PBB P-2 dan BPHTB.

¹⁷ *Ibid.* Pasal 13 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

¹⁸ *Ibid.* Pasal 14 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

¹⁹ *Ibid.* Pasal 14 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

- c melakukan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - e melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3 Seksi Pelaporan mempunyai tugas²⁰ :
- a menyusun laporan Pendapatan Daerah.
 - b melakukan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi.
 - c melakukan perhitungan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kepada Desa.
 - d memberikan peringatan / teguran kepada UPTD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas keterlambatan penyampaian laporan Pendapatan Daerah.
 - e menyiapkan laporan tunggakan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
 - f menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, tribulan dan tahunan.
 - g menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - h melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.²¹

- e Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan, keberatan

²⁰ *Ibid.* Pasal 14 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

²¹ *Ibid.* Pasal 14 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

dan pengurangan, pembetulan, pembatalan serta pemeriksaan.²² Untuk melaksanakan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi²³ :

- 1 perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan.
- 2 pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan.
- 3 pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding.
- 4 pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- 5 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.²⁴ Bidang Penagihan dan Keberatan mewakili 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1 Seksi Penagihan mempunyai tugas²⁵ :
 - a menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.

22 *Ibid.* Pasal 15 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

23 *Ibid.* Pasal 15 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

24 *Ibid.* Pasal 15 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

25 *Ibid.* Pasal 16 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

- b melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.
 - c memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan.
 - d menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - e melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2 Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas²⁶ :
- a memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
 - b memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - c melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN).
 - d memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding.
 - e memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - f menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - g melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3 Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas²⁷ :
- a mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - b melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah.
 - c melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2.
 - d menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - e melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

²⁶ *Ibid.* Pasal 16 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

²⁷ *Ibid.* Pasal 16 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

Masing – masing Seksi yang telah disebutkan diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.²⁸

f Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pengendalian, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pemantauan dan evaluasi pendapatan daerah.²⁹ Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi³⁰ :

- 1 perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
- 2 perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pembangunan pasar milik pemerintah daerah.
- 3 pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- 4 pelaksanaan koordinasi teknis terhadap UPTD.
- 5 perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- 6 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

28 *Ibid.* Pasal 16 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

29 *Ibid.* Pasal 17 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

30 *Ibid.* Pasal 17 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.³¹ Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1 Seksi Pengendalian mempunyai tugas³² :
 - a melakukan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
 - b melakukan verifikasi permohonan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk pasar tradisional, pasar grosir dan/atau pertokoan.
 - c melaksanakan koordinasi teknis dengan UPTD.
 - d mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
 - e menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - f melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2 Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan mempunyai tugas³³ :
 - a mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b menyiapkan bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
 - c melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah.
 - d memproses permohonan mutasi dari objek pajak baru dan PBB P-2.
 - e menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - f melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3 Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas³⁴ :
 - a melakukan evaluasi laporan pendapatan Daerah.
 - b melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan pembangunan pasar milik Pemerintah Daerah.
 - c melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

31 *Ibid.* Pasal 17 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

32 *Ibid.* Pasal 18 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

33 *Ibid.* Pasal 18 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

34 *Ibid.* Pasal 18 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

- d menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- e melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.³⁵

g Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD terdiri dari³⁶ :

- 1 UPTD Pendapatan Kecamatan :
 - a UPTD Pendapatan Kecamatan Besuki.
 - b UPTD Pendapatan Kecamatan Bandung.
 - c UPTD Pendapatan Kecamatan Pakel.
 - d UPTD Pendapatan Kecamatan Campurdarat.
 - e UPTD Pendapatan Kecamatan Tanggunggunung.
 - f UPTD Pendapatan Kecamatan Pucanglaban.
 - g UPTD Pendapatan Kecamatan Kalidawir.
 - h UPTD Pendapatan Kecamatan Rejotangan.
 - i UPTD Pendapatan Kecamatan Ngunut.
 - j UPTD Pendapatan Kecamatan Sumbergempol.
 - k UPTD Pendapatan Kecamatan Boyolangu.
 - l UPTD Pendapatan Kecamatan Gondang.
 - m UPTD Pendapatan Kecamatan Kauman.
 - n UPTD Pendapatan Kecamatan Tulungagung.
 - o UPTD Pendapatan Kecamatan Kedungwaru.
 - p UPTD Pendapatan Kecamatan Ngantru.
 - q UPTD Pendapatan Kecamatan Karangrejo.
 - r UPTD Pendapatan Kecamatan Sendang.

³⁵ *Ibid.* Pasal 18 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

³⁶ *Ibid.* Pasal 19 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

s UPTD Pendapatan Kecamatan Pagerwojo

UPTD Pendapatan Kecamatan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di wilayah Kecamatan³⁷. UPTD Pendapatan Kecamatan fungsi³⁸ :

- a penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kebijakan teknis dinas.
- b pelaksanaan program kerja dinas dan kebijakan teknis dinas.
- c pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak Daerah dan retribusi daerah.
- d pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan.
- e pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian di lingkup UPTD.
- f pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- g pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pelayanan pasar.
- h pelaksanaan tertib administrasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi pasar.
- i pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pembangunan pasar.
- j pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan Camat di wilayah kerjanya.
- k pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Kecamatan sebagaimana dimaksud diatas, meliputi³⁹ :

a Kepala UPTD

37 *Ibid.* Pasal 20 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

38 *Ibid.* Pasal 20 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

39 *Ibid.* Pasal 20 ayat (3), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

Kepala UPTD mempunyai tugas⁴⁰ :

- melaksanakan program kerja dinas.
- memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas.
- melaksanakan urusan ketatausahaan.
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

b Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas⁴¹ :

- melaksanakan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- melaksanakan tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi.
- menjaga ketentraman, ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPTD.

c Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.⁴²

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam

40 *Ibid.* Pasal 20 ayat (4), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

41 *Ibid.* Pasal 20 ayat (5), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

42 *Ibid.* Pasal 22, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

2 UPTD Pelayanan PBB P-2 dan BPHTB.

UPTD Pelayanan PBB P-2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan terkait pelayanan PBB P-2 dan BPHTB.⁴⁴ UPTD Pelayanan PBB P-2 dan BPHTB mempunyai fungsi⁴⁵ :

- a penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kebijakan teknis dinas.
- b pelaksanaan program kerja dinas dan kebijakan teknis dinas.
- c pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan.
- d pelaksanaan pendistribusikan dan menerima kembali formulir pelayanan PBB P-2 dan BPHTB yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
- e pelaksanaan cetak masal SPPT dan DHKP PBB P-2.
- f pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan permohonan pelayanan PBB P-2 dan BPHTB.

43 *Ibid.* Pasal 23, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

44 *Ibid.* Pasal 21 ayat (1), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

45 *Ibid.* Pasal 21 ayat (2), Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

- g pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan permohonan validasi dan memvalidasi SSPD BPHTB.
- h pelaksanaan entry data hasil pelayanan PBB P-2 dan BPHTB serta menyampaikan kepada Wajib Pajak atau yang diberi kuasa.
- i pelaksanaan tertib administrasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan PBB P-2 dan BPHTB.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

B. Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung

Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak

Yang Menyampaikan SPTPD Dengan Tidak Benar

Dalam kaitannya dalam pemungutan pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung. Peraturan diatas tersebut merupakan peraturan dasar atau pokok bagi Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugasnya diantaranya yaitu pemungutan pajak daerah, karena selain pemungutan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung juga bertugas dalam hal pembukuan pajak daerah seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendapatan juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kecamatan-Kecamatan di semua daerah di Kabupaten Tulungagung.

Selain tugas pemungutan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung juga berperan dalam pengawasan pajak daerah. Mengingat pentingnya suatu pajak bagi keberlangsungan daerah, pajak daerah sendiri digunakan sebagai sarana pembangun daerah guna mencapai kesejahteraan bagi daerah. Fungsi pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Tulungagung juga sebagai upaya dalam peningkatan dan pengontrolan pajak daerah. Upaya peningkatan berkaitan dengan pengaruh jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga fungsi pengawasan dapat menarik benang merah apa yang kurang dan perlu ditingkatkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴⁶ Pengontrolan berfungsi sebagai upaya mengontrol jalannya pemungutan pajak daerah dari wajib pajak sampai ke kas daerah.

Pengertian Pemungutan menurut Peraturan Daerah Kabupaten

Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa, “Pemungutana adalah suatuangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya”.

Jadi pemungutan telah meliputi seluruh kegiatan mulai dari penghimpunan sampai ke penegawasan, dan selanjutnya pemungutan diserahkan kepada bagian dari masing-masing yang memiliki wewenang dalam pemungutan setiap jenis pajak tersebut. Yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang berada di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Tulungagung.

Semua teknis pelaksanaan diatas berlaku untuk semua jenis pajak, yang membedakan adalah cara pemungutan yang meliputi teori pemungutannya, wajib pajaknya dan perhitungan pajaknya. Tak terkecuali pajak hotel, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan

46 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Junaedi. Seksi Penagihan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 5 Januari 2017.

oleh hotel.⁴⁷ Objek Pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjangnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan di hotel.⁴⁸ Subjek pajak hotel sendiri adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Pemungutan pajak hotel ditetapkan sebesar 10 %. Untuk klasifikasi hotel disebutkan bahwa hotel merupakan penyedia jasa penginapan beserta fasilitasnya, termasuk perumahan kos juga termasuk sebagai hotel, dengan catatan kamar kos terdiri lebih dari 10 (sepuluh) kamar.⁴⁹ Untuk pemungutan pajak sendiri selama satu tahun kalender dan penagihan setiap satu bulan sekali.

Perhitungan pajak hotel terhutang sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Omset 1 bulan} \times 10\% / 12\%$$

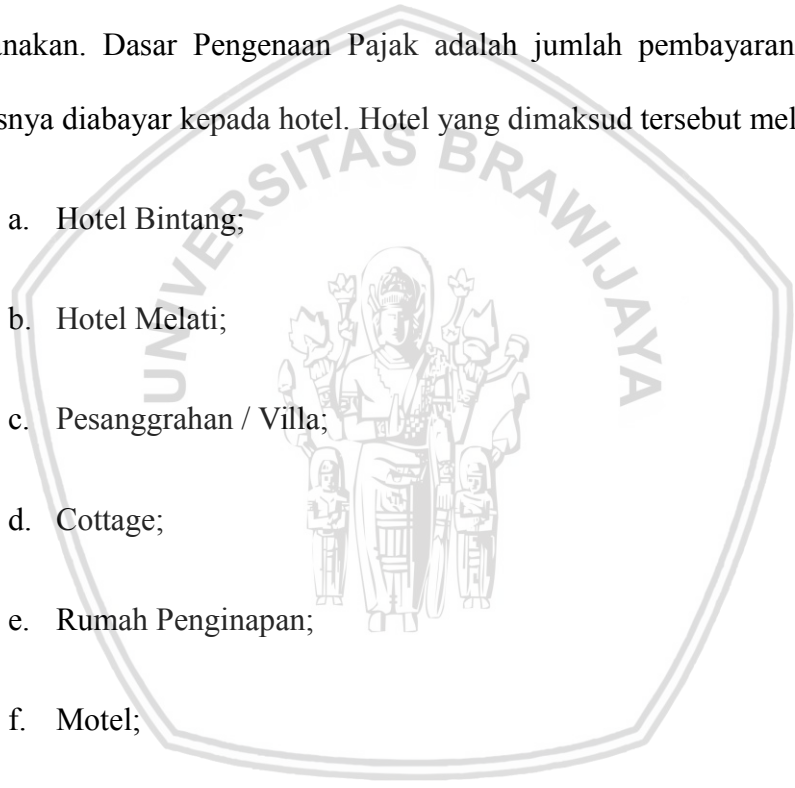
Dalam pemungutan pajak hotel sendiri teori pemungutan yang digunakan adalah teori *self assessment system* yang mana wajib pajak yang menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya

47 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemungutan Pajak Hotel, Pasal 1 angka 8, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 31.

48 *Ibid.* Pasal 1 angka 9, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 31.

49 Hasil wawancara dengan ibu Susi Handajani, SE. Seksi Keberatan dan Pengurangan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 5 Januari 2017.

berbeda dengan pajak-pajak yang menggunakan teori pemungutan *Office Assesment System* yang perhitungannya dihitung oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah. Istem pemungutan Pajak Hotel dengan *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimulai dari mendaftarkan, menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak terutang, menyetor jumlah pajak terutang dan melaporkannya sendiri jumlah pajak yang telah disetor, belum dapat dilaksanakan. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel. Hotel yang dimaksud tersebut meliputi :

- 
- a. Hotel Bintang;
 - b. Hotel Melati;
 - c. Pesanggrahan / Villa;
 - d. Cottage;
 - e. Rumah Penginapan;
 - f. Motel;
 - g. Losmen;
 - h. Gubuk Pariwisata;
 - i. Wisma Pariwisata;
 - j. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh kamar.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.* Pasal 5 , Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 31.

Berikut merupakan besarnya tariff Pajak Hotel yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Hotel. Pasal 6.

- a. Hotel Bintang sebesar 10%
- b. Hotel Melati sebesar 10%
- c. Pesanggrahan / Villa sebesar 10%
- d. Cottage sebesar 10%
- e. Rumah Penginapan sebesar 10%
- f. Motel sebesar 10%
- g. Losmen sebesar 10%
- h. Gubuk Pariwisata sebesar 10%
- i. Wisma Pariwisata sebesar 10%
- j. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar sebesar 5%

Dalam rangka mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan bagi wajib pajak yang memiliki objek pajak di daerah Kabupaten Tulungagung, Bagi wajib pajak hotel yang baru berikut merupakan tata cara pendaftaran dan pendataan objek pajak yang baru :

- a. Mempersiapkan dokumen. Yang dimaksud dokumen berupa formulir pendaftaran dan pendataan yang kemudian diberikan pada wajib pajak.
- b. Formulir tersebut selanjutnya diisi oleh wajib pajak yang bersangkutan dan kemudian diserahkan kepada Petugas Pajak. Formulir tersebut harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar.
- c. Lalu petugas mengembalikan formulir yang telah diisi tersebut dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan,
“Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saran administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya”.⁵¹
- d. Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), setiap awal tahun pajak atau masa pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh wajib pajak dan akan disetorkan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
- f. Data perpajakan diatas dihimpun dan dicatat dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir dan akan dijadikan

51 *Ibid.* Pasal 1 angka 26, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 31.

sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.⁵² Berikut merupakan bentuk blangko SPTPD




52 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Junaedi. Seksi Penagihan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 5 Januari 2017.

Gambar 4.2

Blanko SPTPD

TANGGAL : 08 Oktober 2012

CONTOH BLANKO SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) UNTUK PAJAK HOTEL



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Jl. A. Yani Timur 37, Telp. 0355 320098 Fax. 0355
TULUNGAGUNG, Kode Pos 66217

Hal. Muka

No. SPTPD : _____
 Tahun : _____

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK WAJIB PAJAK / PEMILIK HOTEL

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

a. Nama Hotel : _____
 b. Nama Pengusaha / Pemilik : _____
 c. Alamat : _____
 - Rumah / No. Telp. : _____
 - Tempat Usaha / No. Telp. : _____
 d. Luas Tempat Usaha : _____
 e. Nomor dan Tanggal Ijin Usaha : _____
 f. Jumlah Pegawai : _____
 g. Jumlah Kamar Hotel : _____
 h. Masa Pajak : _____
 i. Perhitungan Pajak Hotel : _____ x _____
 j. Pajak Terhutang : _____
 k. Batas Penyetoran terakhir : _____

Nomor Kamar	Golongan Kamar	Tarif (Rp.)	Jumlah Kamar

I. Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bentahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PERHATIAN

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan (BP) Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung atau melalui Kasda / Bank Jatim (No. Rekening : 0151001300).
- SPTPD ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan pejabat yang berwenang
- Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Tulungagung,

Wajib Pajak

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hal. Belakang

II.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____
 - Alamat Kantor / No. Telp. : _____
 - Alamat Rumah / No. Telp. : _____

Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini kami / saya isi dengan benar lengkap dan tidak bersyarat.

(.....)
 Wajib Pajak

(.....)
 Nama Jelas

DISI OLEH BENDAHARA PENERIMA DIPENDA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Diterima : _____
 Nama Petugas : _____
 NIP. : _____

(.....)
 Nama Jelas

BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU TJAHJONO

4

repository.ub.ac.id

Untuk tata cara perhitungan dan penetapan pajak hotel adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- b. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut tidak ataupun kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) diterima, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % dari pajak yang terhutang sebulan dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- c. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun sesudah terutangnya pajak maka bupati dapat menerbitkan :
 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPDN).
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dapat diterbitkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan Kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak terpenuhi.

Untuk jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

- e. Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutang pajak.
- f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) diterbitkan apabila ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang. Apabila ditemukan data baru ini maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari kekurangan pajak tersebut.
- g. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit.
- h. Dalam hal kewajiban membayar pajak terhutang yang tercantum dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dibayar maka pajak yang

terutang ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan.⁵³ Berikut merupakan format SKPDKB, SKPDKBT dan STPD :



⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Junaedi. Seksi Penagihan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 5 Januari 2017.


Gambar 4.3

Blanko SKPDKB



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 31 TAHUN 2012
 TANGGAL : 08 Oktober 2012

A. CONTOH BLANKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR UNTUK PAJAK HOTEL


 PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG <small>Jl. A. Yani Timur 37, Telp. 0355-320000 Fax. 0355- TULUNGAGUNG, Kode Pos 66217</small>	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKDB) Masa Pajak : _____ Tahun : _____	NOMOR 										
Nama Badan / Merk Usaha : _____ Alamat : _____ NPWPD : _____ Nama Pemilik / Pengelola : _____												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor Kohir</td> <td style="width: 70%;">:</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Ditetapkan</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Pajak Hotel Terhutang</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Sanksi Administrasi (25 %)</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> </tr> </table>			Nomor Kohir	:	Tanggal Ditetapkan	:	Pajak Hotel Terhutang	:	Sanksi Administrasi (25 %)	:	Jumlah	:
Nomor Kohir	:											
Tanggal Ditetapkan	:											
Pajak Hotel Terhutang	:											
Sanksi Administrasi (25 %)	:											
Jumlah	:											
Dengan Huruf XX												
<p>PERHATIAN :</p> <p>Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p style="text-align: right;">Tulungagung, KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG</p> <p style="text-align: center;">_____</p>												

Gambar 4.4

Blanko SKPKDBT



B. CONTOH BLANKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN UNTUK PAJAK HOTEL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG Jl. A. Yani Timur 37, Telp. 0355-320088 Fax. 0355-..... TULUNGAGUNG, Kode Pos 66217</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN</p> <p>(SKPKBT)</p> <p>Masa Pajak : _____ Tahun : _____</p>	<p>NOMOR</p>												
<p>Nama Badan / Merk Usaha : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>NPWPD : _____</p> <p>Nama Pemilik / Pengelola : _____</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Nomor Kohir</td> <td style="width: 60%;">: _____</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Ditetapkan</td> <td>: _____</td> </tr> <tr> <td>Pajak Hotel Terhutang</td> <td>: _____</td> </tr> <tr> <td>Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan</td> <td>: _____</td> </tr> <tr> <td>Sanksi Administrasi (25 %)</td> <td>: _____</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: _____</td> </tr> </table>			Nomor Kohir	: _____	Tanggal Ditetapkan	: _____	Pajak Hotel Terhutang	: _____	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan	: _____	Sanksi Administrasi (25 %)	: _____	Jumlah	: _____
Nomor Kohir	: _____													
Tanggal Ditetapkan	: _____													
Pajak Hotel Terhutang	: _____													
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan	: _____													
Sanksi Administrasi (25 %)	: _____													
Jumlah	: _____													
<p>Dengan Huruf XXXXXXXXXX</p>														
<p>PERHATIAN :</p> <p>Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p style="text-align: right;">Tulungagung, KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG</p>														

Gambar 4.5

Blanko STPD

Dalam pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TulungAgung mengenai pajak hotel masih terdapat beberapa masalah mengenai penyetoran pajak oleh wajib pajak hotel.

Karena perhitungan pajak terutang pajak hotel menggunakan teori self assessment yang berarti kepatuhan wajib pajak menjadi dasar kepercayaannya. Dalam prakteknya semua wajib pajak hotel di Kabupaten Tulungagung telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, sehingga yang ada hanya ketidaksesuaian dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Maka ketentuan Pasal 115 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang menyebutkan wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut tidak ada. Yang ada hanyalah ketidakbenaran penyampaian atau mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).⁵⁴

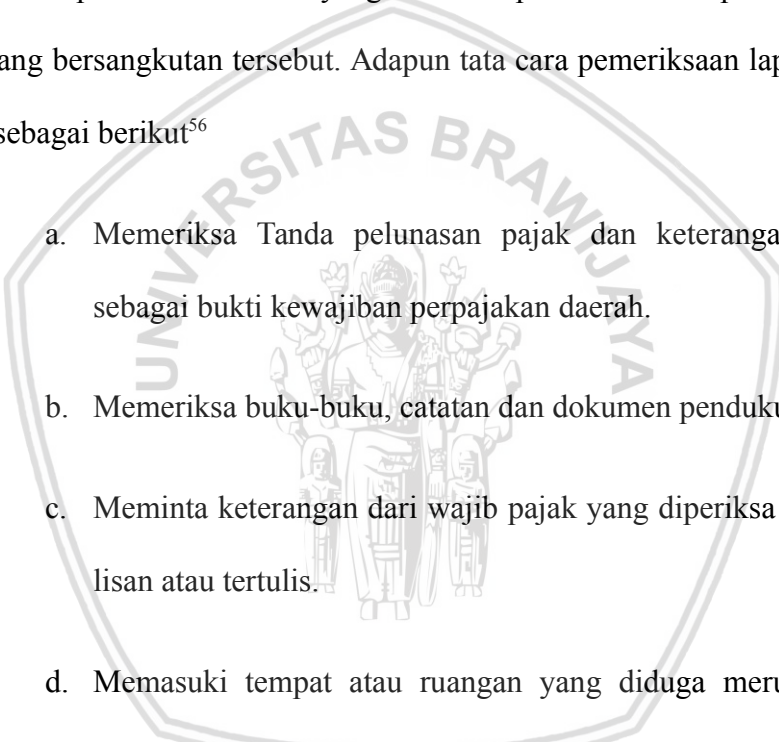
Apabila dalam praktek ditemukan ketidakbenaran penyampaian atau mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung berhak melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Bentuk pemeriksaan sendiri ada dua yaitu Pemeriksaan LENGKAP dan Pemeriksaan Sederhana. Pemeriksaan lengkap dilakukan ditempat wajib pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan sederhana dilakukan dilapangan terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan

54 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Junaedi. Seksi Penagihan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 5 Januari 2017.

menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman sederhana. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan dikantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.⁵⁵

Apabila ditemukan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang tidak benar pengisiannya maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten berhak melayangkan surat pemeriksaan kepada wajib pajak yang bersangkutan tersebut. Adapun tata cara pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut⁵⁶

- 
- a. Memeriksa Tanda pelunasan pajak dan keterangan lain sebagai bukti kewajiban perpajakan daerah.
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung
 - c. Meminta keterangan dari wajib pajak yang diperiksa secara lisan atau tertulis.
 - d. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang atau barang yang dapat dijadikan petunjuk.
 - e. Melakukan penyegelan tempat.

55 *Ibid.* Pasal 31, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 31

56 Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Prima Hartawan, SE. Seksi Pemeriksaan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 10 Januari 2017.

f. Meminta keterangan pihak ketiga.

Untuk tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Apabila hasil pemeriksaan positif wajib pajak tidak benar dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan berhak memanggil wajib pajak datang ke Dinas Pendapatan guna melakukan negosiasi terhadap kekurangan pajak yang terutang.⁵⁷ Sebenarnya dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemungutan Pajak Hotel pasal 9 ayat (8) disebutkan,

“Dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (Seratus Persen) dari kekurangan pajak tersebut.”

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung menggunakan system negosiasi dikarenakan apabila dilakukan sesuai perda maka Wajib Pajak tidak mau membayar dan mengelak. Sistem ini digunakan agar Dinas Pendapatan juga tidak merugi atas kekurangan pembayaran pajak terutang. Sehingga tidak merugikan Pendapatan Asli Daerah..⁵⁸

57 Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Prima Hartawan, SE. Seksi Pemeriksaan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 10 Januari 2017.

58 Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Prima Hartawan, SE. Seksi Pemeriksaan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 18 Januari 2017.

No.	Surat Pemberitahuan		Nama	Alamat	NPWP	Masa Pajak		Omset	Total
	Tanggal	No.urut				Bulan	Tahun		
1	21/6/2016	HTL160700053	WIBI TONO/ARYA GUEST HOUSE	IL WAHIDIN SUDIRO HUSODO 10	P2000355714006	JUL	2016	3,770,000.00	377,000.00
2	4/8/2016	HTL160700054	BINTARJO/KOSKEMBAR	IL MT HARYONO	P2000001114006	JUL	2016	4,500,000.00	450,000.00
3	9/8/2016	HTL160700055	BAMBANG SUGARTO/ HOTEL NASIONAL	IL PAHLAWAN NO 1	P2000239715010	JUL	2016	37,427,310.00	3,742,731.00
4	9/8/2016	HTL160700056	BAMBANG SUGARTO/ HOTEL SURAKARTA	IL MHTAMRIN	P2002353140061	JUL	2016	100,899,280.00	10,089,928.00
5	10/8/2016	HTL160700057	PESANGGRAHAN ARGO WILUS	IL RA KARTINI	P2000345550066	JUL	2016	15,224,000.00	1,522,400.00
6	11/8/2016	HTL160700058	SRIANI/HOTEL RESTO & KARAOKE NARITA	IL AGUSSALIM 87-89	P2000043485111	JUL	2016	332,220,370.00	33,222,037.00
7	12/8/2016	HTL160700059	AZIZAH RUMAH KOST	IL KM SAKORO 05	P2000445052302	JUL	2016	1,000,000.00	100,000.00
8	12/8/2016	HTL160700062	STI RUKAYAH	KEL PANGGUNGREJO KEC TULUNGAGUNG	P2000013334736	MEI	2016	4,800,000.00	480,000.00
9	12/8/2016	HTL160700061	HASYIM A.SHARIF/ PENGINAPAN PONDOK	IL JAYENG KUSUMA NO 17	P2003636822000	JUL	2016	2,000,000.00	200,000.00
10	15/8/2016	HTL160700060	RETNO ERNAWATI	PERUM PURIMASELOK P 16	P2000012334762	JUL	2016	6,500,000.00	650,000.00
11	15/8/2016	HTL160700063	WAWANG SUDIARWO/ HOTEL POPOHINDAH	DS BESOLE	P2000238445677	JUL	2016	12,895,000.00	1,289,500.00
12	15/8/2016	HTL160700064	OEN KOK PWEE/ HOTEL TANJUNG	IL ADI SUKPTO 42	P2000023383993	JUL	2016	50,780,000.00	5,078,000.00
13	15/8/2016	HTL160700065	SUPARMAN/ RUMAH KOS	IL MAYJEND SUNKONO GANG 5	P2000238384774	JUL	2016	300,000.00	15,000.00
14	15/8/2016	HTL160700066	WAHYUDI EKO PURNOMO/ RUMAH KOS	IL SUPRIADI RUK NIRWANA PLASA	P2000028309303	JUL	2016	1,000,000.00	100,000.00
15	15/8/2016	HTL160700067	AVIA FEBITA NURMANING/ GRIYO ARVIAN	PERUM RIMBAKARYA TIMUR 6	P2000034048010	JUL	2016	2,700,000.00	270,000.00
16	16/8/2016	HTL160700068	DRA PUJIASTUTI/ GRIYO MERCY	IL JAYENG KUSUMA	P2000282830090	JUL	2016	5,000,000.00	500,000.00
17	16/8/2016	HTL160700072	WIKI YOGA WILJAY/ HOTEL & DEPOT WILJAYA	IL TEJUKU UMAR II/4	P2000393703933	JUL	2016	35,000,000.00	3,500,000.00
18	16/8/2016	HTL160700071	MUNAWAN/ RUMAH KOS BAROKAH	DS PLOSO KANDANG	P2000073737225	JUL	2016	300,000.00	15,000.00
19	16/8/2016	HTL160700070	TANTRI TRISNAWATI/ HOTEL PALEM GARDEN	IL SULTAN AGUNG	P2000774732745	JUL	2016	37,500,000.00	3,750,000.00
20	18/8/2016	HTL160700069	TAMPIASTUTI/ RUMAH KOS	DS NGUJANG	P2000464883990	JUL	2016	1,125,000.00	112,500.00
21	18/8/2016	HTL160700076	BAMBANG SUDJONO/ HOTEL GAJAH MAS	IL RA KARTINI	P2000737362277	JUL	2016	58,310,000.00	5,831,000.00
22	18/8/2016	HTL160700075	MOCH. SOEJOED/ HOTEL PUSPITA	IL PDIPONEGORO GG V	P2000048484763	JUL	2016	15,000,000.00	1,500,000.00
23	18/8/2016	HTL160700074	H. MASHUDI RIDWAN/ RUMAH KOS	IL WR SUPRATMAN NO 43	P2000021818381	JUL	2016	2,000,000.00	200,000.00
24	19/8/2016	HTL160700073	M. ANGGI DIGDO SHMH.	IL WR SUPRATMAN NO 1	P2000839039730	JUL	2016	1,800,000.00	180,000.00
25	19/8/2016	HTL160700078	HOTEL SWALLOH RESORT & SPA	DS MULYOSARI	P2000038375221	JUL	2016	28,136,220.00	2,813,622.00
26	19/8/2016	HTL160700079	GSGUK PRIYSDV/ RUMAH KOS	IL YOS SUDARSO	P2000017265070	JUL	2016	1,250,000.00	125,000.00
27	22/8/2016	HTL160700080	SRI MURTININGSIH/ HOTEL SRIKANDI	IL SIAGUN NO 7 NGUNUT	P2000037352118	JUL	2016	11,105,000.00	1,110,500.00
28	23/8/2016	HTL160700083	DRSPUII SUPRIYONO/ VILLA & RESTO	DESA WONO REJO	P2000039376118	JUL	2016	57,056,780.00	5,705,678.00
29	23/8/2016	HTL160700082	CHRISTINE BAYANTI. SE DJAVA	IL WAHIDIN SUDIRO HUSODO 27	P2000182870802	JUL	2016	6,370,000.00	637,000.00
30	23/8/2016	HTL160700081	R. MALONDA/ HOTEL MALUNDA	IL JAYENG KUSUMA	P2000018137371	JUL	2016	83,202,000.00	8,320,200.00
31	24/8/2016	HTL160700084	WIDYA ARIYANTO/ RUMAH KOS SERUT	PERUM VILLA SATWIKI 20 BEI	P2000039238829	JUL	2016	3,000,000.00	300,000.00
32	26/8/2016	HTL160700085	YULIUS HARDY/ GRAND HOTEL	IL IGUSTI NGURAH RAI 26	P2000011233940	JUL	2016	38,030,000.00	3,803,000.00
33	26/8/2016	HTL160700086	TRI HANDOKO/ HOTEL MULYA JAYA	IL RAYA BUTAR 29	P2000029293910	JUL	2016	12,000,000.00	1,200,000.00
34	29/8/2016	HTL160700087	ARDANI SURYO/ HOTEL ISTANA	IL KH AGUSSALIM 73-74	P2000093830147	JUL	2016	49,437,390.00	4,943,739.00
35	29/8/2016	HTL160700088	WIBISONO WONGSO DIHARJO/ HOTEL PALAPA	IL TEJUKU UMAR 81-83	P2000645783910	JUL	2016	90,455,000.00	9,045,500.00
36	29/8/2016	HTL160700089	MIFTAKUROMAH/ HOTEL PANORAMA	IL TEJUKU UMAR 76	P2000038365700	JUL	2016	107,000,000.00	10,700,000.00
37	29/8/2016	HTL160700090	HOTEL CROWN VICTORIA	IL SUPRIADI 41 RUKO NO 1 RWANA	P2000827072082	JUL	2016	849,971,000.00	84,997,100.00
38	30/8/2016	HTL160700091	OPONGKY YUDI ATMOKO/ PAMA HOSTEL	IL RANGUMA SUDIRMAN GG 8	P2000283998910	JUL	2016	3,900,000.00	390,000.00
39	31/8/2016	HTL160700092	MUJIONO/ HOTEL INDONESIA	IL KAPTEN KASHIN 214	P2000006783820	JUL	2016	4,750,000.00	475,000.00

C. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Dalam Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Dengan Tidak Benar.

Dalam melakukan tugasnya tentu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung banyak menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan terbesar yaitu kurang kesadaran membayar pajak dari wajib pajak. Memang sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tulungagung sendiri masih kurang kesadarannya akan membayar pajak. Dan kurang mengerti akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Sebagian masyarakat di Kabupaten Tulungagung memang masih terlihat bahwa membayar pajak masih menjadi tanggungan atau beban dalam kehidupan ekonomi mereka.

Memang pajak sendiri dapat memotong sebagian ekonomi dari masyarakat akan tetapi tidak begitu saja pajak mengurangi kesejahteraan masyarakat. Justru dengan adanya pajak, terjadi pemerataan di berbagai daerah yang khususnya masih memiliki ekonomi rendah. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi akan memberikan dampak yang signifikan dalam penerimaan keuangan di Kabupaten Tulungagung. Kondisi ini akan melancarkan pengalokasian dana bagi pemerintah kabupaten dan juga pemerintah desa di Kabupaten Tulungagung sehingga dapat melancarkan

pembangunan di daerah maupun di desa. Maka masyarakat harus memiliki pemahaman bahwa pajak dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Selain itu masih ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal pelaporan jumlah pendapatan yang kena pajak. Yaitu mengenai nilai yang dibayar bertentangan dengan kondisi wajib pajak. Dalam hal pemungutan pajak hotel sendiri banyak ditemukan-ditemukan kecurangan seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang tidak benar. Sehingga dapat mengganggu pendapatan daerah. Mengingat pajak hotel penerapannya menggunakan *Self Assessment System* yang mana tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak diuji. Apabila dapat bersikap professional maka hal-hal kecurangan tidak akan terjadi.⁵⁹

Solusi yang dilakukan Dinas Pendapatan dalam menghadapi hambatan-hambatan diatas adalah dengan pemeriksaan berkala kepada wajib pajak hotel. Sehingga dapat meminimalisir kecurangan tersebut. Mengingat bahwa banyaknya kecurangan yang masih terjadi. Dalam pemeriksaan sendiri Dinas Pendapatan melaksanakan dengan benar dan sesuai aturan sehingga dapat menyelesaikan hambatan tersebut dan menghindari hal-hal yang berbau dengan KKN. Selain itu untuk menghindari penyyuapan kepada petugas maka Dinas Pendapatan

59 Hasil wawancara dengan ibu Susi Handajani, SE. Seksi Keberatan dan Pengurangan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 23 Januari 2017.

berkompeten dalam bertindak. Demi mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang bebas dari KKN.⁶⁰



60 Hasil wawancara dengan ibu Susi Handajani, SE. Seksi Keberatan dan Pengurangan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 23 Januari 2017.



BAB V

PENUTUP

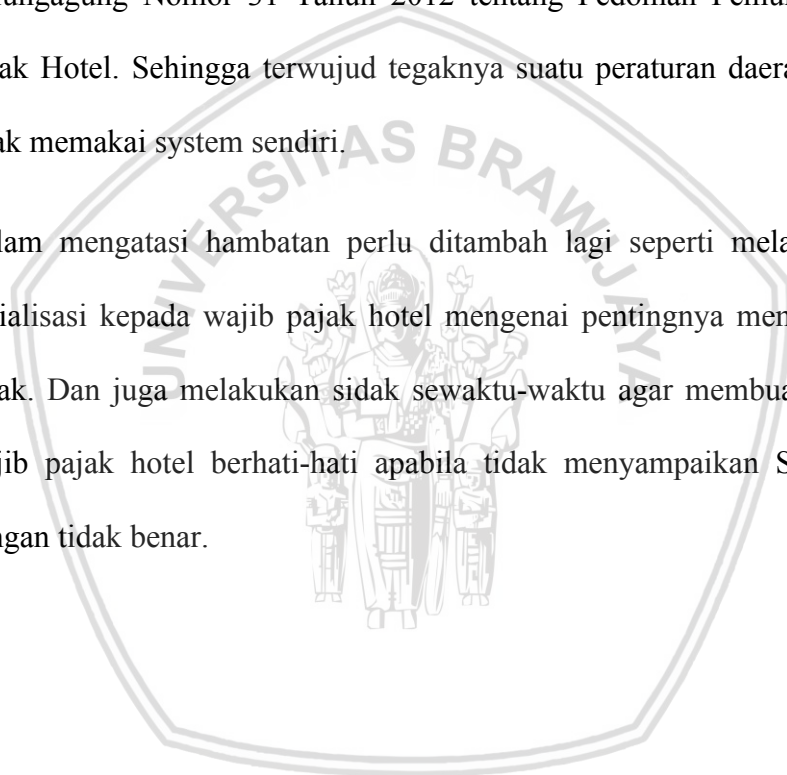
A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut

- a. Dalam kaitan Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Dengan Tidak Benar tidak melakukan sesuai amanat Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Hotel.
- b. Dalam kaitan Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Dalam Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Dengan Tidak Benar adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat. Sehingga dalam prakteknya masih banyak kecurangan-kecurangan. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak hotel secara berkala dan mendorong petugas pajak untuk berkompeten dalam bertugas untuk menghindari penyuapan yang dilakukan wajib pajak.

B. Saran

- a. Seharusnya Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah maupun Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Hotel. Sehingga terwujud tegaknya suatu peraturan daerah dan tidak memakai system sendiri.
- b. Dalam mengatasi hambatan perlu ditambah lagi seperti melakukan sosialisasi kepada wajib pajak hotel mengenai pentingnya membayar pajak. Dan juga melakukan sidak sewaktu-waktu agar membuat para wajib pajak hotel berhati-hati apabila tidak menyampaikan SPTPD dengan tidak benar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afan Gaffar, **Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi**, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 295.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Erly Suandy, **Hukum Pajak Edisi 5**, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Guntur Setiawan, **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan**, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2004.
- H. Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2003.
- Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Bintang Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Cet ke. 8, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Tunggul Anshari, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia, Malang, 2005.
- Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang

Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang

Pajak Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010

Nomor 01 Seri B.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Bupati Tulugagung Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Pemungutan, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 31.

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, Berita Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 66.

C. Internet

Belajar Pajak, 2012, (online), <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>,

diakses 1 Desember 2016.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data agar sesuai dengan kenyataan dengan mempelajari dan menganalisa data yang diperoleh dari tempat penelitian. Oleh karena itu metode penelitian yang dibuat untuk memecahkan masalah diatas adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mempelajari, menganalisa, dan mengidentifikasi hukum yang diterapkan masyarakat untuk mengetahui kebenarannya dengan hukum yang berlaku.¹ Dalam penelitian ini berarti penelitian hukum yang langsung terjun ke lapangan untuk menggali informasi dan data-data mengenai Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Pajak Hotel dengan tidak benar, dan apa

¹H.Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 30.

hambatan serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Pajak Hotel dengan tidak benar.

C. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari 2 (dua) yaitu

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya atau dari objek penelitian, data ini dapat diperoleh melalui hasil wawancara atau observasi.²

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti melalui media perantara seperti buku literatur, peraturan perundang-undangan dan atau peraturan-peraturan lain yang mendukung penelitian, majalah, koran, internet dan lain sebagainya yang mendukung penelitian.³

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh peneliti dari wawancara staf bagian pembukuan dan pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh peneliti dari sudi kepustakaan, literatur serta dokumen yang berkaitan dengan pajak daerah dan permasalahannya.

² Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 42.

³ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Cet ke. 8, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm 137.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Pajak Hotel dengan tidak benar, teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

a. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara langsung kepada responden.

b. Teknik Pengumpulan data sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari atau menelusuri daftar-daftar bacaan seperti buku, skripsi, thesis, maupun disertasi, majalah, koran, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan.⁴

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

3) Studi Internet

Studi internet merupakan teknik pengumpulan data yang didapat melalui media internet yang berkaitan dengan mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak khususnya terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPTPD dengan tidak benar.

F. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

⁴ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 55.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasari karena terkait peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai satu-satunya pihak yang dapat memungut pajak daerah di Kabupaten Tulungagung.

G. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat dikatakan mewakili populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil bagian penagihan dan Keberatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, serta responden berasal dari staf bagian pembukuan dan penerimaan PBB.

c. Teknik Sampling

Proses menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan dari sudut pandang peneliti dan peneliti berhak menentukan responden yang dapat mewakili populasi tersebut, atau dapat dikatakan sebagai metode pengambilan sampel secara subyektif peneliti. merupakan suatu proses pemilihan sampel yang didasarkan atas pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti.⁵

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan teknik analisa data dengan cara memaparkan atau mendeskripsikan data yang

⁵Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 91.

diperoleh dari hasil penelitian dan dari sumber data yang lain seperti buku; dokumen; dan lain-lain, setelah itu menganalisa data untuk keperluan dalam menyusun pembahasan penelitian dan juga untuk membuat kesimpulan.

I. Definisi Operasional

- a. Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan atas kebijakan ke dalam masyarakat, yang berarti merupakan penerapan pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- b. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶
- c. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel di Kabupaten Tulungagung.
- d. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan membayar pajak.
- e. Pemungutan adalah proses penghimpunan, penentuan, penagihan, dan penyetoran suatu iuran wajib yang dibayarkan secara berkala kepada aparat pemungut atau pemerintah yang dapat berbentuk pajak maupun retribusi dan ditujukan kepada wajib pajak atau wajib retribusi.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

